

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Singgih, dkk (2017) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu kecurangan eksternal dan kecurangan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu entitas. Sementara kecurangan internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak dalam entitas. Orang dalam yang melakukan kecurangan bisa saja adalah karyawan, manajer, bahkan eksekutif atau pihak yang memiliki jabatan tinggi. Salah satu jenis kecurangan internal yang dilakukan adalah tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan tidak legal dan merugikan orang banyak.

Responden pada penelitian ini adalah aparatur desa yang ada di kantor desa di setiap empat kabupaten yang menerima penggelontoran dana desa dari pemerintah pusat, yaitu Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengajukan surat permohonan penelitian kepada Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang ditujukan untuk Lurah Desa di desa Tamantirto, Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Panggunharjo, Pendowoharjo, Bangunharjo, Bantul dan Palbapang untuk wilayah kabupaten Bantul, Desa Ambarketawang, Balecatur, Nogotirto, Sidomulyo, Sidoagung, Sumberharjo dan Madurejo untuk wilayah kabupaten Sleman, desa Giripurwo, Girijati, Giriasih, Giricahyo, Giritirto, Patuk, dan Salam untuk wilayah kabupaten Gunungkidul, dan desa Jatisarono, Tanjungharjo, Wijimulyo, Banyuroto, Donomulyo, Banjararum, Banjarharjo, Banguncipto, dan Sentolo untuk wilayah kabupaten Kulon Progo.

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 217 kuesioner kepada aparatur desa yang ada pada setiap kantor desa. Penyebaran dan pengambilan dilakukan mulai tanggal 27 September 2019 hingga tanggal 23 Oktober 2019.

## B. Gambaran Umum Responden

### 1. Data Demografi Responden

Sampel yang diambil peneliti dalam membangun penelitian ini adalah aparatur desa di lingkup kantor Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 217 aparatur desa. Peta pendistribusian kuesioner terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Penyebaran Kuesioner**

<b>Kabupaten</b>	<b>Kantor Desa</b>	<b>Kuesioner di Bagikan</b>	<b>Kuesioner yang kembali</b>
Bantul	Tamantirto	7	7
	Bangunjiwo	7	6
	Tirtonirmolo	7	4
	Panggunharjo	7	2
	Pendowoharjo	7	5
	Bangunharjo	7	7
	Bantul	7	6
Sleman	Palbapang	7	5
	Ambarketawang	7	5
	Balecatur	7	6
	Nogotirto	7	7
	Sidomulyo	7	5
	Sidoagung	7	7
	Sumberharjo	7	5
Gunungkidul	Madurejo	7	7
	Giripurwo	7	7
	Girijati	7	7
	Giriasih	7	4
	Giritirto	7	7
	Giricahyo	7	5

Kabupaten	Kantor Desa	Kuesioner di Bagikan	Kuesioner yang kembali
	Patuk	7	6
	Salam	7	7
Kulon Progo	Jatisarono	7	6
	Tanjungharjo	7	6
	Wijimulyo	7	7
	Banyuroto	7	5
	Donomulyo	7	5
	Banjararum	7	4
	Banjarharjo	7	3
	Banguncto	7	4
	Sentolo	7	7
<b>Total</b>		<b>217</b>	<b>174</b>

Sumber: Data Primer

Jumlah kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini adalah 217 kuesioner. Gambar mengenai data sampel penelitian terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dikirim	217	100%
Kuesioner yang kembali	182	84%
Kuesioner yang tidak kembali	35	16%
Kuesioner yang dapat kembali dan diolah	174	96%
Kuesioner yang tidak dapat di olah	8	4%

Sumber: Data Primer

Karakteristik responden menunjukkan identitas responden seperti jenis kelamin, jabatan, dan nama desa tempat responden yang bersangkutan berkerja. Deskripsi mengenai karakteristik responden ditunjukkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Karakteristik Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
Jenis Kelamin	Jumlah Responden:	174	100%
	- Laki laki	124	71%
	- Perempuan	50	29%
Jabatan di Kantor Desa	Jumlah Responden:	174	100%
	- Kepala Desa	4	2%
	- Sekretaris Desa	25	14%
	- Kepala Urusan	77	45%
	- Kepala Seksi	68	39%
Desa	Jumlah Responden:	174	100%
	- Tamantirto	7	4%
	- Bangunjiwo	6	3,4%
	- Tirtonirmolo	4	2,2%
	- Panggungharjo	2	1,1%
	- Pendowoharjo	5	2,8%
	- Bangunharjo	7	4%
	- Bantul	6	3,4%
	- Palbapang	5	2,8%
	- Ambarketawang	5	2,8%
	- Balecatur	6	3,4%
	- Nogotirto	7	4%
	- Sidomulyo	5	2,8%
	- Sidoagung	7	4%
	- Sumberharjo	5	2,8%
	- Madurejo	7	4%
	- Giripurwo	7	4%
	- Girijati	7	4%
	- Giriasih	4	2,2%
	- Giritirto	7	4%
	- Giricahyo	5	2,8%
	- Patuk	6	3,4%
	- Salam	7	4%
- Jatisarono	6	3,4%	
- Tanjungharjo	6	3,4%	

<b>Keterangan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
	- Wijimulyo	7	4%
	- Banyuroto	5	2,8%
	- Donomulyo	5	2,8%
	- Banjararum	4	2,2%
	- Banjarharjo	3	1,7%
	- Banguncripto	4	2,2%
	- Sentolo	7	4%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 4.3, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 124 responden atau sebesar 71% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 50 responden atau sebesar 29% maka disimpulkan bahwa responden terbanyak pada penelitian ini adalah laki-laki. Jumlah responden berdasarkan jabatan yang diduduki di kantor desa menunjukkan bahwa jumlah responden yang menduduki jabatan Kepala Desa sebanyak empat orang atau sebesar 2%, Sekretaris Desa sebanyak 25 orang atau sebesar 14%, Kepala Urusan sebanyak 77 orang atau sebesar 45%, dan Kepala Seksi sebanyak 68 orang atau sebesar 39% maka disimpulkan bahwa responden terbanyak menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan. Sementara itu, jumlah responden terbanyak yang diperoleh untuk setiap Kantor Desa sebagai obyek penelitian, yaitu sebanyak tujuh responden atau sebesar 4% terletak di desa Tamantirto, Bangunharjo, Nogotirto, Sidoagung, Madurejo, Giripurwo, Girijati, Giritirto, Salam, Wijimulyo, dan Sentolo. Sementara itu, Balai Desa selain yang disebutkan tersebut memiliki jumlah responden < 7 atau < 4%.

## 2. Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Konstruk-konstruk yang digunakan dalam penelitian ini akan dideskripsikan melalui tabel di bawah ini. Data yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini diperoleh dari hasil pengolahan menggunakan program SPSS v.15. Tabel akan menunjukkan informasi mengenai jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Kisaran Aktual			Kisaran Teoritis			Std. Deviation
		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	
JAP	174	5	20	14,03	4	20	12	3,282
FP	174	4	20	11,92	4	20	12	3,271
KAP	174	7	20	12,89	4	20	12	2,514
IM	174	3	15	11,43	3	15	9	2,127
SW	174	3	15	10,73	3	15	9	1,974
R	174	5	23	13,53	5	25	15	3,182
RE	174	20	35	29,87	14	35	24,5	4,009
PF	174	7	25	16,08	5	25	15	3,581
<i>Valid N (listwise)</i>	174							

Sumber: Output SPSS v.15

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**a. Jabatan Aparatur Desa**

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel jabatan aparatur desa terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 4-20 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 12. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 5-20 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 14,03 dan standar deviasi sebesar 3,28. Nilai rata-rata aktual  $>$  rata-rata teoritis, yaitu  $14,03 > 12$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh jabatan aparatur desa di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah tinggi.

**b. *Financial pressure***

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel *financial pressure* terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 4-20 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 12. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 4-20 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 11,92 dan standar deviasi sebesar 3,27. Nilai rata-rata aktual  $<$  rata-rata teoritis, yaitu  $11,92 < 12$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh *financial pressure* di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah rendah.

**c. Kompetensi Aparatur Desa**

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel kompetensi aparatur desa terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 4-20

dengan rata-rata (*mean*) sebesar 12. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 7-20 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 12,89 dan standar deviasi sebesar 2,51. Nilai rata-rata aktual > rata-rata teoritis, yaitu  $12,89 > 12$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh kompetensi aparatur desa di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah tinggi.

**d. *Ineffective monitoring***

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel *ineffective monitoring* terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 3-15 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 9. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 3-15 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 11,43 dan standar deviasi sebesar 2,12. Nilai rata-rata aktual > rata-rata teoritis, yaitu  $11,43 > 9$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh *ineffective monitoring* di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah tinggi.

**e. *Sistem Weakness***

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel sistem *weakness* terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 3-15 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 9. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 3-15 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 10,73 dan standar deviasi sebesar 1,97. Nilai rata-rata aktual > rata-rata teoritis, yaitu



10,73 > 9 sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh sistem *weakness* di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah tinggi.

**f. Rasionalisasi**

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel rasionalisasi terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 5-25 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 15. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 5-23 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 13,53 dan standar deviasi sebesar 3,18. Nilai rata-rata aktual < rata-rata teoritis, yaitu  $13,53 < 15$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh rasionalisasi di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah rendah.

**g. Religiusitas**

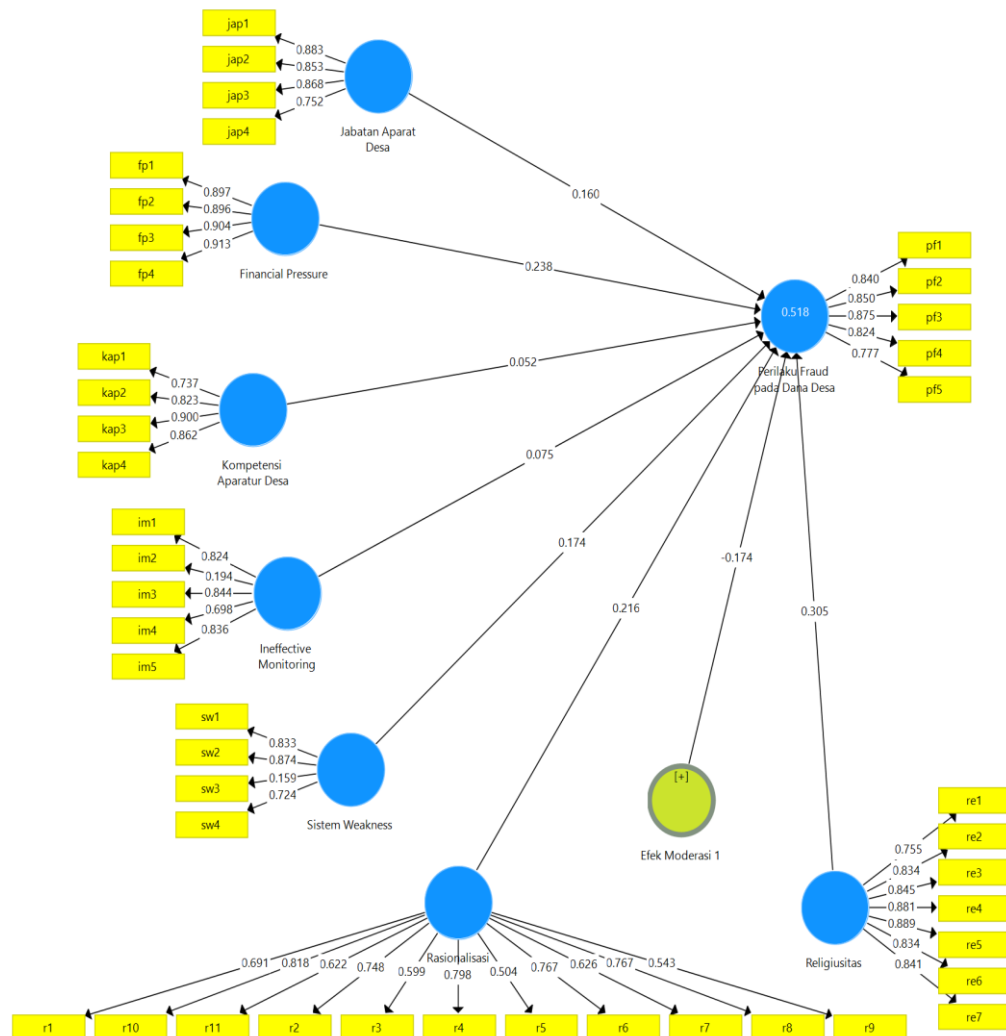
Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel religiusitas terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 14-35 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 24,5. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 20-35 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 29,87 dan standar deviasi sebesar 4,00. Nilai rata-rata aktual > rata-rata teoritis, yaitu  $29,87 > 24,5$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh religiusitas di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah tinggi.

#### **h. *Fraud* pada Dana Desa**

Hasil uji statistik deskriptif yang pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah untuk variabel *fraud* pada dana desa terdiri dari 174 data. Secara teoritis rentang nilai minimal dan maksimal adalah 5-25 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 15. Sedangkan secara aktual menunjukkan bahwa rentang nilai minimal dan maksimal adalah 7-25 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 16,08 dan standar deviasi sebesar 3,58. Nilai rata-rata aktual  $>$  rata-rata teoritis, yaitu  $16,08 > 15$  sehingga hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengaruh *fraud* pada dana desa di kantor pemerintahan desa di Provinsi DIY adalah tinggi.

### 3. Evaluasi Model

#### a. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)



**Gambar 4.1. Tampilan Output Model Pengukuran**

Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk menguji kualitas model pengukuran, yaitu validitas dan reliabilitas data konstruk. Pengujian validitas dilakukan dua kali, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Berikut adalah hasil pengujian *outer model* menggunakan aplikasi *SmartPLS v3.0*:

### 1) Validitas Konvergen

Indikator pengujian validitas konvergen dapat dilihat dari dua tabel, yaitu *outer loading* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. *Rule of Thumb* dari *outer loading* adalah nilai yang ditunjukkan untuk setiap konstruk harus lebih besar dari 0,7, sedangkan *Rule of Thumb* dari AVE adalah nilai yang lebih besar dari 0,5 untuk setiap variabel laten. Berikut hasil *calculate* Algoritma PLS.

#### a) *Outer loading*

**Tabel 4.5**  
*Outer loading*

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	1,001								
FP1		0,897							
FP2		0,896							
FP3		0,904							
FP4		0,913							
IM1			0,824						
IM2			0,194						
IM3			0,844						
IM4			0,698						
IM5			0,836						
JAP1				0,883					
JAP2				0,853					
JAP3				0,868					
JAP4				0,752					
KAP1					0,737				
KAP2					0,823				
KAP3					0,900				

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
<b>KAP4</b>					<b>0,862</b>				
<b>PF1</b>						<b>0,840</b>			
<b>PF2</b>						<b>0,850</b>			
<b>PF3</b>						<b>0,875</b>			
<b>PF4</b>						<b>0,824</b>			
<b>PF5</b>						<b>0,777</b>			
<b>R1</b>							0,691		
<b>R10</b>							<b>0,818</b>		
<b>R11</b>							0,622		
<b>R2</b>							<b>0,748</b>		
<b>R3</b>							0,599		
<b>R4</b>							<b>0,798</b>		
<b>R5</b>							0,504		
<b>R6</b>							<b>0,767</b>		
<b>R7</b>							0,626		
<b>R8</b>							<b>0,767</b>		
<b>R9</b>							0,543		
<b>RE1</b>								<b>0,755</b>	
<b>RE2</b>								<b>0,834</b>	
<b>RE3</b>								<b>0,845</b>	
<b>RE4</b>								<b>0,881</b>	
<b>RE5</b>								<b>0,889</b>	
<b>RE6</b>								<b>0,834</b>	
<b>RE7</b>								<b>0,841</b>	
<b>SW1</b>									<b>0,833</b>
<b>SW2</b>									<b>0,874</b>
<b>SW3</b>									0,159
<b>SW4</b>									<b>0,724</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Suatu konstruk dikatakan valid apabila konstruk menunjukkan nilai  $> 0,70$ . Berdasarkan output pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang  $< 0,70$  diantaranya IM2, IM4, R1, R3, R5, R7, R9, R11, dan SW3. Artinya, indikator-indikator tersebut dikatakan belum valid dan harus dihapuskan agar memenuhi *rule of*

*thumb* yang ditetapkan, yaitu  $> 0,70$ . Tabel 4.6 menunjukkan *outer loading* dengan model yang telah dimodifikasi.

**Tabel 4.6**  
***Outer loading* Model Modifikasi**

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	1,033								
FP1		0,897							
FP2		0,896							
FP3		0,904							
FP4		0,913							
IM1			0,872						
IM3			0,864						
IM5			0,880						
JAP1				0,883					
JAP2				0,853					
JAP3				0,868					
JAP4				0,752					
KAP1					0,737				
KAP2					0,823				
KAP3					0,900				
KAP4					0,862				
PF1						0,840			
PF2						0,852			
PF3						0,876			
PF4						0,823			
PF5						0,776			
R10							0,872		
R2							0,819		
R4							0,845		
R6							0,802		
R8							0,831		
RE1								0,755	
RE2								0,834	
RE3								0,845	
RE4								0,881	
RE5								0,889	
RE6								0,834	

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
<b>RE7</b>								<b>0,841</b>	
<b>SW1</b>									<b>0,833</b>
<b>SW2</b>									<b>0,879</b>
<b>SW4</b>									<b>0,736</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 4.6, seluruh indikator setiap variabel menunjukkan angka  $> 0,70$ . Dengan demikian, seluruh indikator dapat dinyatakan valid. Selain dari tabel 4.6 nilai *outer loading* juga dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2. Tampilan Model Modifikasi



b) *Average Variance Extracted (AVE)*

**Tabel 4.7**  
*Average Variance Extracted (AVE)*

	<b>Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)</b>
<i>Efect Moderating</i>	<b>1,000</b>
<i>Financial pressure</i>	<b>0,814</b>
<i>Ineffective monitoring</i>	<b>0,760</b>
<b>Jabatan Aparatur Desa</b>	<b>0,706</b>
<b>Kompetensi Aparatur Desa</b>	<b>0,694</b>
<i>Fraud Pada Dana Desa</i>	<b>0,696</b>
<b>Rasionalisasi</b>	<b>0,696</b>
<b>Religiusitas</b>	<b>0,707</b>
<b>Sistem Weakness</b>	<b>0,669</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai *Average Variance Extracted* > 0,5 untuk masing-masing variabel. Variabel yang memiliki nilai AVE terkecil adalah Sistem *Weakness* dan variabel yang memiliki nilai AVE terbesar adalah *Financial pressure*. Artinya, seluruh variabel pada penelitian ini dapat dikatakan valid.

2) **Validitas Diskriminan**

Indikator pengujian validitas diskriminan adalah Akar AVE yang terlihat dalam tabel *Fornell Larcker* pada *Algoritma PLS Report*. Nilai yang ditunjukkan untuk setiap variabel seharusnya lebih besar dari nilai hubungan antar variabel. Selain itu, pengujian validitas diskriminan juga dapat dilihat dari tabel *cross loading*. *Cross loading* menunjukkan nilai

antara konstruk dan indikatornya. Nilai antara konstruk dan indikatornya harus lebih besar dibanding nilai konstruk tersebut dengan indikator konstruk lain sehingga konstruk tersebut mampu memprediksi indikatornya lebih baik dibanding dengan indikator konstruk lain.

a) Akar AVE

**Tabel 4.8**  
*Fornell-Larcker*

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	<b>1,000</b>								
FP	-0,003	<b>0,902</b>							
IM	-0,221	-0,037	<b>0,872</b>						
JAP	-0,193	0,124	0,392	<b>0,840</b>					
KAP	-0,069	0,359	0,171	0,253	<b>0,833</b>				
PF	-0,196	0,428	0,301	0,375	0,306	<b>0,834</b>			
R	0,242	0,276	0,031	-0,042	0,162	0,220	<b>0,834</b>		
RE	-0,099	0,043	0,336	0,259	0,053	0,447	-0,047	<b>0,841</b>	
SW	-0,112	0,368	0,137	0,195	0,213	0,495	0,198	0,352	<b>0,818</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai akar AVE untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai hubungan antara variabel. Sebagai contoh, nilai akar AVE untuk variabel *Financial pressure* adalah 0,902 lebih besar dari nilai hubungan antara variabel *Financial pressure* dengan *ineffective monitoring*, jabatan

aparatur desa, kompetensi aparatur desa, *fraud* pada dana desa, rasionalisasi, dan sistem *weakness*. Dengan demikian, seluruh variabel dikatakan valid.

b) *Cross Loading*

**Tabel 4.9**  
***Cross Loading***

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	<b>1,000</b>	-0,003	-0,221	-0,193	-0,069	-0,196	0,242	-0,099	-0,112
FP1	0,041	<b>0,897</b>	-0,036	0,079	0,301	0,369	0,297	0,027	0,320
FP2	-0,067	<b>0,896</b>	-0,050	0,110	0,334	0,358	0,200	-0,002	0,310
FP3	0,022	<b>0,904</b>	-0,053	0,145	0,296	0,392	0,235	0,068	0,335
FP4	-0,011	<b>0,913</b>	0,000	0,112	0,362	0,421	0,262	0,056	0,359
IM1	-0,126	-0,112	<b>0,872</b>	0,306	0,141	0,247	0,053	0,319	0,112
IM3	-0,186	-0,061	<b>0,864</b>	0,374	0,221	0,230	0,004	0,285	0,145
IM5	-0,253	0,054	<b>0,880</b>	0,348	0,101	0,301	0,022	0,277	0,105
JAP1	-0,107	0,092	0,373	<b>0,883</b>	0,196	0,289	-0,034	0,201	0,159
JAP2	-0,111	0,080	0,356	<b>0,853</b>	0,224	0,304	0,010	0,142	0,085
JAP3	-0,245	0,126	0,306	<b>0,868</b>	0,229	0,361	-0,056	0,266	0,236
JAP4	-0,167	0,114	0,289	<b>0,752</b>	0,199	0,295	-0,060	0,253	0,161
KAP1	-0,064	0,262	0,144	0,128	<b>0,737</b>	0,157	0,202	-0,012	0,046
KAP2	-0,071	0,305	0,125	0,220	<b>0,823</b>	0,176	0,083	0,022	0,095
KAP3	-0,035	0,346	0,082	0,289	<b>0,900</b>	0,312	0,120	0,069	0,196
KAP4	-0,073	0,282	0,221	0,180	<b>0,862</b>	0,306	0,153	0,063	0,284
PF1	-0,121	0,413	0,285	0,245	0,303	<b>0,840</b>	0,271	0,353	0,437
PF2	-0,189	0,386	0,226	0,319	0,341	<b>0,852</b>	0,189	0,366	0,398
PF3	-0,202	0,403	0,331	0,287	0,259	<b>0,876</b>	0,192	0,369	0,447

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
<b>PF4</b>	-0,134	0,322	0,219	0,315	0,202	<b>0,823</b>	0,118	0,396	0,314
<b>PF5</b>	-0,170	0,249	0,183	0,408	0,161	<b>0,776</b>	0,135	0,384	0,462
<b>R10</b>	0,189	0,255	0,005	-0,025	0,137	0,250	<b>0,872</b>	-0,037	0,203
<b>R2</b>	0,161	0,208	0,065	0,031	0,146	0,141	<b>0,819</b>	-0,036	0,150
<b>R4</b>	0,206	0,201	-0,005	-0,090	0,117	0,133	<b>0,845</b>	-0,058	0,136
<b>R6</b>	0,200	0,135	-0,049	-0,084	0,156	0,106	<b>0,802</b>	-0,042	0,132
<b>R8</b>	0,247	0,289	0,082	-0,034	0,131	0,209	<b>0,831</b>	-0,032	0,170
<b>RE1</b>	-0,023	0,024	0,302	0,166	0,069	0,311	-0,081	<b>0,755</b>	0,296
<b>RE2</b>	-0,088	0,011	0,313	0,272	0,077	0,395	-0,037	<b>0,834</b>	0,221
<b>RE3</b>	-0,025	0,021	0,297	0,184	0,075	0,366	-0,037	<b>0,845</b>	0,276
<b>RE4</b>	-0,091	0,029	0,261	0,255	0,047	0,400	-0,058	<b>0,881</b>	0,319
<b>RE5</b>	-0,112	0,036	0,233	0,187	0,048	0,361	-0,012	<b>0,889</b>	0,272
<b>RE6</b>	-0,166	0,112	0,313	0,246	-0,009	0,445	-0,057	<b>0,834</b>	0,378
<b>RE7</b>	-0,051	0,000	0,251	0,192	0,016	0,318	0,011	<b>0,841</b>	0,296
<b>SW1</b>	-0,107	0,277	0,122	0,163	0,106	0,381	0,121	0,319	<b>0,833</b>
<b>SW2</b>	-0,081	0,276	0,197	0,159	0,152	0,443	0,155	0,363	<b>0,879</b>
<b>SW4</b>	-0,089	0,353	0,005	0,156	0,268	0,388	0,211	0,172	<b>0,736</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai indikator setiap konstruk untuk seluruh variabel menunjukkan nilai > 0,7. Artinya, setiap indikator pernyataan yang digunakan untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid.

### 3) Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability*. Chin (1995) dalam modul Sofyani mengenai PLS menyatakan bahwa apabila nilai *cronbachs alpha* dan *Composite Reliability*  $> 0,6$  maka konstruk dikatakan reliabel. Berikut hasil pengujian yang dilakukan:

**Tabel 4.10**  
*Cronbachs Alpha dan Composite Reliability*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
<i>Efect Moderating</i>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<i>Financial pressure</i>	<b>0,924</b>	<b>0,946</b>
<i>Ineffective monitoring</i>	<b>0,844</b>	<b>0,905</b>
<b>Jabatan Aparatur Desa</b>	<b>0,860</b>	<b>0,906</b>
<b>Kompetensi Aparatur Desa</b>	<b>0,857</b>	<b>0,900</b>
<b>Fraud Pada Dana Desa</b>	<b>0,890</b>	<b>0,919</b>
<b>Rasionalisasi</b>	<b>0,894</b>	<b>0,919</b>
<b>Religiusitas</b>	<b>0,931</b>	<b>0,944</b>
<b>Sistem Weakness</b>	<b>0,750</b>	<b>0,858</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability* untuk seluruh konstruk pada penelitian ini  $> 0,6$ . Dengan demikian, seluruh konstruk adalah reliabel.

## b. Evaluasi Model struktural (*Inner Model*)

Menurut Jogiyanto (2014), untuk menghitung evaluasi model struktural dapat dilakukan dengan *R-Square* untuk konstruk yang dipengaruhi dan *Path Coefficients* untuk mengetahui dan menguji signifikansi hubungan setiap konstruk. Berikut hasil pengujian yang dilakukan:

### 1) R Square

**Tabel 4.11**  
*Nilai Adjusted R-Square*

	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
<i>Fraud Pada Dana Desa</i>	0,501	<b>0,477</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Pengukuran model struktural Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa *Fraud* pada Dana Desa dipengaruhi 47,7% oleh variabel independennya dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

### 2) Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis, terdapat tiga indikator yang harus diperhatikan sebagai kriteria pengujian hipotesis, yaitu *original sample*, *t-statistic*, dan *p-values*. *Original sample* digunakan untuk

menyimpulkan arah hipotesis (positif dan negatif), sedangkan *t-statistic* dan *p-values* digunakan untuk menunjukkan signifikansi. Jika nilai *t-statistic* > 1,66 dan *p-values* < 0,05 maka dapat dikatakan signifikan. Nilai *Original sample*, *t-statistic*, dan *p-values* ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut:

**Tabel 4.12**  
***Path Coefficient***

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>t-statistik</i>	<i>p-values</i>
<b>Efek Moderasi 1 -&gt; <i>Fraud Pada Dana Desa</i></b>	-0,122	2,006	<b>0,045</b>
<b><i>Financial pressure -&gt; Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,261	3,517	<b>0,000</b>
<b><i>Ineffective monitoring -&gt; Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,079	1,108	0,268
<b>Jabatan Aparatur Desa -&gt; <i>Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,163	2,288	<b>0,023</b>
<b>Kompetensi Aparatur Desa -&gt; <i>Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,068	1,027	0,305
<b>Rasionalisasi -&gt; <i>Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,146	2,521	<b>0,012</b>
<b>Religiusitas -&gt; <i>Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,288	4,605	<b>0,000</b>
<b>Sistem Weakness -&gt; <i>Fraud Pada Dana Desa</i></b>	0,198	2,647	<b>0,008</b>

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan hasil *bootstrapping* pada tabel 4.12 di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) **Pengaruh Jabatan Aparatur Desa terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,163 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah  $2,28 > 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,02 < 0,05$ . Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H<sub>1</sub> diterima**. Artinya, Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa.

b) **Pengaruh *Financial pressure* terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,261 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah  $3,51 > 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H<sub>2</sub> diterima**. Artinya, *Financial pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*.

c) **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,068 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai



*t-statistic* adalah  $1,02 < 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,35 > 0,05$ . Dengan demikian, kriteria signifikansi pada pengujian hipotesis tidak terpenuhi atau **H<sub>3</sub> ditolak**. Artinya, Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pada dana desa.

**d) Pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,079 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah  $1,10 < 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,26 > 0,05$ . Dengan demikian, kriteria signifikansi pada pengujian hipotesis tidak terpenuhi atau **H<sub>4</sub> ditolak**. Artinya, *Ineffective Monitoring* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pada dana desa.

**e) Pengaruh Sistem *Weakness* terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,198 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah  $2,64 > 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H<sub>5</sub> diterima**. Artinya, Sistem *Weakness* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa.

**f) Pengaruh Rasionalisasi terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,146 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah  $2,52 > 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,01 < 0,05$ . Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H<sub>6</sub> diterima**. Artinya, Rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa.

**g) Religiusitas, Rasionalisasi, dan *Fraud* pada Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah negatif sebesar 0,122 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah  $2,006 > 1,66$  dan nilai *p-values* adalah  $0,04 < 0,05$ . Seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi dan **H<sub>7</sub> diterima**. Artinya, Religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa. Dengan demikian, berdasarkan penelitian Sandri, dkk (2015) bahwa Religiusitas masuk kedalam kategori kuasi moderasi karena variabel Religiusitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada dana desa.

## C. Pembahasan

### 1. Jabatan Aparatur Desa terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel jabatan aparatur desa menunjukkan bahwa jabatan aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Farouq (2014) menyatakan bahwa jabatan adalah posisi kerja atau penghargaan yang diberikan kepada setiap orang atas prestasi kerja dan pengabdian yang diberikan untuk negara. Sementara itu, Beasley (1996) dalam penelitian yang dilakukan oleh Irphani (2017) menyatakan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan-tindakan yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki para pejabat untuk maksud pribadi. Definisi jabatan aparatur desa dalam penelitian ini mengarah kepada kekuasaan yang dimiliki pejabat akibat dari kedudukannya dan kekuasaan tersebut yang memudahkan seseorang berbuat curang.

Aparatur desa di lingkup kantor pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perspektif bahwa salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi pada dana desa adalah jabatan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Wolfe dan Hermanson (2004) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku kecurangan adalah orang dalam yang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kedudukan yang tinggi mampu memberikan peluang dan keleluasaan dalam mengoperasionalkan dan melaporkan kondisi keuangan desa sesuai dengan yang diinginkan tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini dikarenakan kedudukan atau jabatan akan memberikan superioritas dan berpengaruh terhadap kecurangan. Di samping

itu, Irphani (2017) juga menjelaskan bahwa *integrity*, *abuse of authority*, *ability to make policy* dan *ability to give pressure* mempermudah pejabat dalam memanipulasi anggaran desa sehingga keleluasaan tersebut dapat mendorong pejabat tinggi dalam melakukan tindakan *fraud* pada dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiartini, dkk (2019) Damayanti, dkk (2018), Irphani (2017), dan Gbegi dan Adebisi (2013) yang menyatakan bahwa jabatan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*.

## **2. *Financial Pressure* terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel *financial pressure* menunjukkan bahwa *financial pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Menurut *fraud pentagon* yang ditemukan oleh Crowe (2011) menjelaskan bahwa terdapat satu elemen pemicu terjadinya *fraud*, yaitu *Pressure* atau tekanan. Dalam penelitian ini, tekanan yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan keuangan. Setiawati dan Baningrum (2018) menyatakan bahwa *financial pressure* adalah kondisi ketika keuangan desa dipengaruhi oleh kondisi keuangan aparatur desa yang bekerja dalam mengelola keuangan desa. Kebutuhan finansial aparatur desa merupakan tekanan yang bersifat internal bagi aparatur desa. Gaji aparatur desa yang tidak terlalu tinggi akan menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan pada penggunaan keuangan desa. Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menjelaskan bahwa apabila pendapatan tidak sebanding dengan

beratnya beban pekerjaan maka menjadi pembenaran dalam melakukan kecurangan atau *fraud*.

Aparatur desa di lingkup kantor pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perspektif bahwa salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi pada dana desa adalah *financial pressure*. Meskipun tingkat gaji dan upah sudah ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku, tetapi Aparatur Desa tetap memberikan perspektif bahwa tekanan keuangan akan memicu terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Hariyanto, dkk (2014) bahwa *pressure* mampu mendorong tindakan berbuat curang ketika memiliki peluang atas tindakan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lambsdorff (1999), Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), dan Suzana (2019) yang menemukan bahwa penghasilan yang kurang memadai berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi.

### **3. Kompetensi Aparatur Desa terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada dana desa. Dalam teori *fraud pentagon* yang dikembangkan oleh Crowe Howard (2011) menjelaskan bahwa kompetensi adalah elemen yang menjadi kesempatan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan akibat kemampuannya dalam mengontrol pengendalian internal dan situasi untuk keuntungan pribadinya. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi

mampu memberikan dampak yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak. Albar, dkk (2019) menjelaskan bahwa elemen kapabilitas adalah kemampuan individu untuk mengesampingkan kontrol internal dan mengubah kontrol tersebut untuk kepentingan pribadi pelaku sehingga pada dasarnya penipuan tidak akan muncul jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang baik.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa adalah kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi dalam teori *fraud pentagon* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* pada sektor pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa *fraud* yang terjadi pada dana desa tidak dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki aparatur desa, hal ini sesuai dengan penjelasan Albar, dkk (2019).

*“The ability to be an important thing that is interrelated rather than the elements that exist in improving the behavior of fraud that occurs”.*

Sejalan dengan penelitian Atmaja (2016), seseorang yang memiliki kemampuan tinggi belum tentu mampu memberikan keleluasaan dalam melakukan kecurangan. Hal ini terjadi karena saat ini pengelolaan keuangan desa sudah menjadi sorotan berbagai pihak sehingga peluang pengaruh kompetensi dalam melakukan kecurangan yang tidak nampak sangat kecil, hal ini dinyatakan oleh Apriada (2019). Sementara Anisykurlillah dan Wardianti, (2019) juga menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap *fraud*

yang terjadi di sektor publik dikarenakan tindakan korupsi telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat sehingga korupsi sudah tidak lagi memandang latar belakang pelaku. Di samping itu, dalam konteks pengelolaan dana desa bahwa pengawasan tetap dilakukan oleh Dewan Komisaris, BPK, Inspektorat, keberadaan prosedur dan peraturan yang berlaku bahkan masyarakat secara langsung sehingga kompetensi yang dimiliki aparatur desa tidak akan mendorong terjadinya *fraud*. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2019), Irphani (2017), dan Aini, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa.

#### **4. *Ineffective monitoring* terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel *ineffective monitoring* menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada dana desa. Artinya, kecurangan pada dana desa terjadi bukan karena ada atau tidaknya pengawasan. *Ineffective monitoring* adalah salah satu proyeksi faktor peluang (*opportunity*) dalam teori *fraud pentagon* yang dijelaskan oleh Crowe Howard (2011). Definisi peluang dalam teori *fraud pentagon* adalah tersedianya lingkungan atau situasi yang tepat dalam melakukan kecurangan. Situasi tepat yang dimaksud salah satunya adalah tidak efektifnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Bentuk pengawasan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi subjek pembangunan desa sehingga masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam proses perencanaan

hingga evaluasi pembangunan desa serta penggunaan keuangan desa secara tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait program desa, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap pencapaian desa. Penelitian Seputro, dkk (2017) mengungkapkan potensi terjadinya *fraud* disebabkan oleh rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan penyusunan APBD yang tidak menggambarkan kebutuhan pengembangan potensi desa.

Berdasarkan data yang telah ditabulasi dan hasil uji statistik deskriptif, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas aparatur desa di Kantor Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perspektif bahwa pengawasan yang tidak efektif oleh masyarakat akan memberikan pengaruh buruk terhadap keberlangsungan pengelolaan dana desa sehingga hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain sebagai pengukur variabel pengawasan selain partisipasi masyarakat, seperti dijelaskan oleh Priyatun (2018) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pada pemerintahan desa sesuai dengan pasal 4 huruf (d) Permendagri nomor 71 tahun 2015 adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten sehingga penyelenggaraan pemerintahan mampu berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian Bawekes, dkk (2018) juga menjelaskan bahwa tidak adanya keefektifan sistem



dikarenakan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi dan komite audit sesuai dengan SAS No. 99.

Peneliti juga beranggapan bahwa hasil yang tidak signifikan ini menggambarkan sebuah kondisi, yaitu partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengawasan guna pencapaian pengelolaan dana desa secara tepat sasaran. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Putra (2013) bahwa salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa yang tepat sasaran adalah pengawasan langsung oleh masyarakat. Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) juga menjelaskan bahwa terdapat faktor lain, yaitu pengawasan yang efektif tidak akan berpengaruh secara efektif dalam mengurangi perilaku kecurangan pada dana desa apabila sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kecurangan.

Penelitian yang menggunakan variabel *ineffective monitoring* dalam mengukur *fraud* pada sektor publik sangat jarang diteliti. Penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel *ineffective monitoring* cenderung diukur dengan porsi dewan komisaris untuk menentukan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) dan Wimardana dan Nurbaiti (2018). Dengan demikian, Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septriani dan Handayani (2018) dan Aini, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud*.

## 5. Sistem *Weakness* terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel sistem *weakness* menunjukkan bahwa sistem *weakness* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Sistem *weakness* adalah sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang pemerintah desa dan setiap komponen perangkat desa, ketidakjelasan kegiatan prioritas dalam pengelolaan dana desa dan ketidaktaatan pada aturan akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas memberikan peluang bagi Aparatur Desa dalam melakukan tindakan kecurangan. Selain itu, menurut Sartono (2006) dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menyatakan bahwa sistem dan prosedur yang kurang efektif dan pengawasan yang tidak efektif memberikan peluang dalam melakukan *fraud*. Sistem dan prosedur yang kurang efektif berkaitan dengan sistem pengendalian internal.

Aparatur Desa di Pemerintahan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berperspektif bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan terjadinya praktik yang tidak sehat dapat menjadi peluang dalam melakukan tindakan *fraud* sekalipun tata cara pengelolaan dana desa sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa sistem yang lemah akan memberikan peluang dalam melakukan tindakan kecurangan sehingga mendukung faktor *opportunity* dalam teori *fraud pentagon*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), Nurharjanti (2017), dan Budiartini, dkk (2019).

## 6. Rasionalisasi terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel rasionalisasi menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Novianti dan Annisa (2018) menyatakan bahwa rasionalisasi bermakna seseorang dapat dipercaya, sekalipun seseorang yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan maka akan dipandang bukan karena kesengajaannya melainkan karena kesalahan sistem atau lingkungan yang menyebabkan *fraud* terjadi sehingga pihak yang melakukan kecurangan merasa dirinya tidak melakukan kesalahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017). Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa rasionalisasi yang diukur dengan menggunakan indikator *planned behavior theory*, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mampu menggambarkan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku kecurangan pada dana desa. Aparatur Desa yang ada di Pemerintahan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung setuju dengan adanya pembenaran yang dilakukan oleh pelaku kecurangan atas tindakan kecurangan yang dilakukan, seperti pelaku menganggap hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang biasa dilakukan orang lain. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan teori *fraud pentagon* dalam penelitian Hariyanto, dkk (2014), yaitu rasionalisasi akan mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), Aini, dkk (2017) dan Dwi, dkk (2017) yang menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

#### **7. Religiusitas memoderasi pengaruh positif Rasionalisasi terhadap *Fraud* pada Dana Desa**

Hasil pengujian hipotesis untuk efek moderasi menunjukkan bahwa religiusitas memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa. Menurut Glock dan Stark (1965) dalam penelitian Pamungkas (2014) menyatakan bahwa religiusitas merupakan bentuk komitmen religius (yang dapat dilihat dari keyakinan iman atau agama yang dianut), yang dapat dilihat melalui perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Setiap orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Fitri dan Nadirsyah (2019) menjelaskan bahwa rasionalisasi tidak akan berpengaruh apabila setiap individu menjunjung tinggi nilai integritas, keimanan dan menyadari bahwa tindakan kecurangan adalah perbuatan yang ilegal.

Aparatur Desa di Pemerintahan Desa di Daerah Provinsi Yogyakarta berpersepsi bahwa manusia yang memiliki religiusitas akan memperhatikan dampak atas suatu sikap dan kepentingan orang lain sehingga tindakan *fraud* yang dipengaruhi oleh adanya pembenaran dalam berperilaku atau

rasionalisasi yang diukur dengan sikap, norma subjektif, dan perilaku kontrol tidak akan terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2014), Egita dan Mahfiroh (2018), dan Basri (2016).

